

**PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM  
PENYALAHGUNAAN DANA PENANGGULANGAN  
BENCANA OLEH KEPALA DESA**

**BENNY SETIAWAN**

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Suhariwanto, S.H., M.Hum.
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah tindakan AS sebagai kepala desa yang menyalahgunakan kewenangan dan menyalahgunakan dana penanggulangan bencana dapat dikenakan perbarengan berdasarkan atas Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang korupsi dan Pasal 78 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pelaku melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana dengan melakukan pemotongan dana dan dengan tidak memberikan dana penanggulangan bencana sesuai dengan perencanaan. Tindakan pelaku melanggar Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 78 UU No. 24 Tahun 2007, sehingga dapat diterapkan konkursus. Pelaku melakukan suatu perbuatan pidana yang masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, yaitu menyalahgunakan pengelolaan dana penanggulangan bencana. Oleh karenanya perbuatan pelaku dapat dikenakan konkursus idealis, Pasal 63 ayat (1) dikatakan : “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

**Kata Kunci:** Penanggulangan Bencana, Korupsi, Konkursus

# **CONCURSUS IN THE MISUSE OF DISASTER MANAGEMENT FUND BY THE HEAD OF THE VILLAGE**

**BENNY SETIAWAN**

Law Faculty, Universitas Surabaya

Abstract – The purpose this study was as a requirement for graduation and obtaining a Bachelor of Law degree at the Law Faculty, Universitas Surabaya. The practical purpose of writing this essay was in order to find out whether the actions of US as a village head who misused his authority and misused the disaster management fund could be charged with concursus based on Article 3 of Law Number 20 of 2001 jo Law No. 31 of 1999 concerning corruption and Article 78 of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The following conclusions were obtained: US committed a misuse of authority in managing disaster management funds by cutting the funds and by not providing disaster management funds in accordance with the plan. This action violated Article 3 of Law No. 20 of 2001 jo Law No. 31 of 1999 and Article 78 of Law No. 24 of 2007, so that a concursus may be applied. US committed a criminal act which was included in more than one criminal rule, namely misusing the disaster management fund. Therefore, the actions of the perpetrators could be subject to idealist concursus, Article 63 paragraph (1) stated that " If an act falls within more than one penal provision, only one of those provisions shall apply whereby, in case of difference, the most severe basic punishment shall be imposed."

**Keywords: Disaster Management, Corruption, Concursus**